

ABSTRAK

Berbagai kasus kecurangan terungkap beberapa waktu terakhir baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan. Sistem *whistleblowing* atau saluran pengaduan sebagai salah satu cara mendeteksi terjadinya kecurangan. Intensi seorang individu untuk melakukan sebuah tindakan memiliki tiga determinan, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh usia, *gender*, komitmen organisasional, *personal cost*, tingkat keseriusan pelanggaran, dan status pelanggar terhadap intensi melakukan *whistleblowing*.

Penelitian ini menggunakan data sampel yaitu Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Diponegoro yang bekerja pada bidang Keuangan, Akuntansi, Pengelolaan Aset dan Satuan Pengawas Internal. Jumlah sampel sebanyak 311 responden diperoleh dengan menggunakan teknik *sampling* jenuh atau sensus. Data dianalisis menggunakan model persamaan struktural yaitu *Partial Least Squares-Structural Equation Modelling* dengan bantuan aplikasi SmartPLS versi 3.2.8.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia, *gender*, komitmen organisasional, *personal cost*, dan keseriusan pelanggaran berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing*, sedangkan status pelanggar tidak berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing*.

Implikasi teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah mendukung *Theory of Planned Behaviour* sebagai teori yang umum digunakan untuk menjelaskan niat dan perilaku *whistleblowing*. Peran para Aparatur Sipil Negara sebagai *whistleblower* perlu mendapat dukungan yang baik sehingga diharapkan dapat meningkatkan intensinya untuk melakukan tindakan *whistleblowing* yang pada akhirnya tindak pelanggaran yang mungkin terjadi dapat diminimalisir.

Kata Kunci : intensi, *whistleblowing*, usia, *gender*, komitmen organisasional, *personal cost*, keseriusan pelanggaran, status pelanggar.